

RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN
MAHAKAM ULU



**PEMERINTAH KABUPATEN
MAHAKAM ULU**

RENCANA KERJA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN
2025**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah- Nya, sehingga dokumen Renja Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Renja Bappelitbangda ini Menjabarkan hasil Renstra 2021-2026 sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, perubahan Renstra ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi yang ditetapkan pada akhir masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Bappelitbangda guna mencapai visi dan misi melalui Indikator Kinerja Bappelitbangda dalam rangka pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD. Segala kekurangan dalam Renstra ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Ujoh Bilang, 04 Maret 2024

Bappelitbangda Mahakam Ulu
Kepala,



Gerry Gregorius S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19710906 200112 1 00

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah /lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Bappelitbangda Mahakam Ulu disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu, Renstra Bappelitbangda Mahakam Ulu, serta berpedoman pada Renja Kementerian PPN/Bappenas. Proses penyusunan Renja Bappelitbangda Tahun 2026 didasarkan pada Renstra Bappelitbangda 2021-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2021. Sesuai dengan tugas dan fungsi. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sistem Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;

1.3 Maksud dan Tujuan

2. Maksud

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

3. Tujuan

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam melakukan penyusunan Renja Bappelitbangda Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun 2021 terhadap capaian renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Bappeda sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2024. Evaluasi terhadap capaian renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2025 sebagai tahun pertama pelaksanaan renstra Bappelitbangda Tahun 2021-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2021 dan Pencapaian RENSTRA Bappeda s/d Tahun 2023

KODE					PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT), KELUARAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Keg s/d Thn 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun		Target Prog/Keg RENJA PD	Perkiraan realisasi capaian target Prog/Keg Renstra PD s/d dgn Thn 2026
(1)					(5)	(6)	(7)	8	(10)	(12)	8=6/7	TARGET	TARGET
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase penunjang pelayanan perkantoran		CC	B	B		B	B
5	1	1	2	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah		CC	B	B		B	B
5	1	1	2.1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

5	1	1	2.1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	1	1	1	1 dokumen	1 dokumen
5	1	1	2.1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
5	1	1	2.1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	1 laporan	1 laporan
5	1	1	2.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran Pada Bappelitbangda Mahakam Ulu							
5	1	1	2.2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	22 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang
5	1	1	2.2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
5	1	1	2.2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3 Laporan	4 Laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan

5	1	1	2.2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan
5	1	1	2.2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan layanan administrasi kepegawaian		20 Orang	22 Orang	28 Orang	28 Orang	28 Orang	28 Orang
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		20 Orang	22 Orang	28 Orang	28 Orang	28 Orang	28 Orang
5	1	1	2.6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan layanan administrasi umum		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
5	1	1	2.6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
5	1	1	2.6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket

5	1	1	2.6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
5	1	1	2.6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaanyang Disediakan		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
5	1	1	2.6	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	12 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
5	1	1	2.8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan layanan jasa penunjang kantor		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
5	1	1	2.8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	-	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
5	1	1	2.8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
5	1	1	2.8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
5	1	1	2.9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		100%	100%	100%	100%	100%	100%

5	1	1	2.9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit
5	1	1	2.9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung
5	1	1	2.9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	-	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program terhadap dokumen perencanaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
0	1	2	2.1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang di tetapkan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	1	2	2.1	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen

5	1	2	2.1	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
5	1	2	2.1	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		1 berita acara	1 berita acara	1 berita acara	1 berita acara	1 berita acara	1 berita acara
5	1	2	2.1	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		1 berita acara	1 berita acara	1 berita acara	1 berita acara	1 berita acara	1 berita acara
5	1	2	2.1	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		1 berita acara	1 berita acara	1 berita acara	1 berita acara	1 berita acara	1 berita acara
5	1	2	2.1	6	Penyiapan Bahan Koordinasi MusrenbangKecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		100 usulan	100 usulan	100 usulan	100 usulan	100 usulan	100 usulan
5	1	2	2.1	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
5	1	2	2.2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	1	2	2.2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan		1 dokumen 1 masukan	1 dokumen 1 masukan	1 dokumen 1 masukan	1 dokumen 1 masukan	1 dokumen 1 masukan	1 dokumen 1 masukan

						Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)							
5	1	2	2.2	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang
5	1	2	2.2	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		-	-	-	-	-	-
5	1	2	2.3		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang di kendalikan dan di evaluasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	1	2	2.3	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		4 Laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan
5	1	2	2.3	2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya		30 Kerjasama	30 kerjasama	30 kerjasama	30 kerjasama	30 kerjasama	30 kerjasama
5	1	2	2.3	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		4 Laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan

5	1	3	2.2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian		6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah
5	1	3	2.2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		4 laporan 4 dokumen	4 laporan 4 dokumen	4 laporan 4 dokumen	4 laporan 4 dokumen	4 laporan 4 dokumen	4 laporan 4 dokumen
5	1	3	2.3		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	1	3	2.3	1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
5	1	3	2.3	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan

5	1	3	2.3	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan		5 Perangakt Daerah	5 Perangkat Daerah	5 Perangakt Daerah	5 Perangakt Daerah	5 Perangkat Daerah	5 Perangakt Daerah
5	1	3	2.3	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			100%					
5	2	3	2.1		Pengelolaan Barang Milik Daerah								
5	2	3	2.1	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun		1 dokumen	-				
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase peningkatan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah		20%	30%	40%	40%	50%	60%
5	5	2	2.1		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								
5	5	2	2.1	2	Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian danPengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum							

5	5	2	2.3	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika			4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen
5	5	2	2.4		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Cakupan dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
5	5	2	2.4	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

2. 1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

VISI MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 adalah:

Membangun Mahulu Untuk Semua : Sejahtera Berkeadilan”

Yang mana visi Mahakam Ulu telah selaras dengan visi Pembangunan Nasional dan Provinsi.



Gambar 3.2. Keselarasan visi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan Visi Pembangunan Nasional dan Provinsi

Penjelasan dari visi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu “ **Membangun Mahulu Untuk Semua : Sejahtera Berkeadilan”**

MAHULU UNTUK SEMUA: Mahulu adalah kabupaten Mahakam Ulu, sebuah wilayah administratif dan geografis setingkat kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. "Untuk Semua" mengandung arti bahwa seluruh atau segenap masyarakat Mahakam Ulu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan tanpa diskriminasi, baik wilayah, agama, ras, etnis, kondisi fisik dan gender

SEJAHTERA: Sejahtera dalam makna terdalamnya adalah bahwa masyarakat Mahakam Ulu melalui proses pembangunan dapat menikmati kehidupan yang layak, aman dan manusiawi. Kehidupan yang layak, aman dan manusiawi berarti bahwa setiap warga dapat terpenuhi hak untuk sehat dan berpendidikan yang layak, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial, mendapatkan jaminan rasa aman dan menjadi bagian dari komunitas yang sehat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial sebagai warga Mahakam Ulu. Untuk merealisasikan visi ini, maka tata kelola pemerintahan di Mahakam Ulu akan diabdikan tidak saja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun juga diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup sosial warga, sehingga warga Mahakam Ulu memiliki etos hidup yang optimis dan memiliki harapan yang baik bagi masa depan diri, keluarga, komunitas maupun

Kabupaten Mahakam Ulu

BERKEADILAN: Pembangunan Mahakam Ulu 2021-2026 mengedepankan pada konsep pembangunan berkeadilan. Pembangunan akan lebih fokus pada program-program dalam rangka memperkecil ketidakmerataan/ketimpangan kesejahteraan. Pembangunan tidak hanya difokuskan pada daerah ibu kota pemerintahan saja, akan tetapi pemerataan pembangunan juga akan dilakukan pada seluruh wilayah penyangga Kabupaten Mahakam Ulu serta daerah terluar (perbatasan) sesuai dengan konsep pembangunan pada RTRW. Mahakam Ulu memandang paradigma pertumbuhan ekonomi di masa depan tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi harus memperhatikan pembangunan yang inklusif.

Hal ini didasari atas kesadaran bahwa pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi kepada pertumbuhan, telah menghasilkan eksklusi sosial dan tiga krisis besar, berupa: ketimpangan sosial, kemiskinan dan kerusakan lingkungan, sehingga perlu paradigma pembangunan baru yang lebih bersifat inklusif. World Economic Forum (WEF) mendefinisikan ekonomi inklusif sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, selanjutnya Bappenas mendefinisikan pembangunan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Pembangunan yang merata diyakini merupakan solusi yang paling tepat dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Mahakam Ulu. Diharapkan dengan konsep pembangunan yang berkeadilan, seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dapat ikut berpartisipasi dalam memajukan perekonomian Mahakam Ulu. Adapun misi Daerah terdiri dari 4 (empat) misi :

1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Misi ini menitik beratkan pada penyediaan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, bisa dinikmati semua kalangan, namun dalam pembangunannya tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan adil memiliki makna pembangunan ke depan harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah Kabupaten Mahakam ulu sehingga diharapkan akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah, menciptakan serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu.

Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut ada pula tujuan yang bersifat non ekonomis, yaitu untuk meningkatkan integritas pertahanan dan keamanan nasional dikarenakan Mahakam Ulu sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara lain. Peningkatan sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan merupakan sistem yang dapat memenuhi rasa keadilan, yaitu dengan mengakomodasi kebutuhan atau permintaan akan aksesibilitas semua pengguna sarana dan prasarana publik dengan aman dan nyaman, memenuhi tingkat efisiensi sumber daya alam, baik dalam hal pemanfaatan sumber daya energi maupun pemanfaatan ruang, dapat dikelola secara transparan dan partisipatif, serta menjamin kesinambungan untuk

generasi mendatang

2. **Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal**

Misi ini akan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan perekonomian, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan kualitas taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu, maka Pemerintah Daerah bersama masyarakat harus mampu memaksimalkan pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Mahakam Ulu secara bijak dan berkelanjutan. Salah satunya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menggali potensi-potensi kemandirian melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi usaha kecil menengah dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Lebih lanjut, kebijakan sektor perekonomian akan diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi sektor informal dengan memberikan berbagai pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui pengembangan usaha kecil berbasis rumah tangga (home industry), penataan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima, penataan dan pengembangan pedagang musiman, serta penguatan daya saing para pedagang keliling. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga harus menjamin adanya keadilan dalam menjalankan usaha ekonomi, baik terhadap pelaku industri berskala besar maupun kecil. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu diharapkan dapat terus mempromosikan potensi dan keunggulan-keunggulan daerah agar memiliki nilai tambah yang tinggi dengan dukungan industri kecil menengah berbasis kerakyatan.

Dalam mendukung aktivitas ekonomi berbasis kerakyatan, keberadaan UMKM dan koperasi diharapkan berkontribusi besar terhadap perekonomian Mahakam Ulu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberadaan UMKM dan koperasi diharapkan menjadi cikal bakal tumbuhnya iklim usaha melalui akses permodalan yang mudah, sehingga jumlah wirausaha di Mahakam Ulu meningkat dan pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melihat potensi budaya dan pariwisata yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu, misi ini diarahkan untuk mendorong Kabupaten Mahakam Ulu sebagai salah satu daerah tujuan wisata, yang tak kalah menariknya dengan daerah tujuan wisata lain di Indonesia. Mahakam Ulu dengan mengusung konsep Ecotourism berbasis budaya yang merupakan konsep pariwisata berwawasan lingkungan dengan mengedepankan kebudayaan dan kearifanan lokal akan mencoba menjadikan pariwisata sebagai salah satu unsur pendorong ekonomi masyarakat. Diharapkan dengan berkembangnya pariwisata, akan bermunculan industri-industri kreatif masyarakat sebagai pendamping sektor wisata yang bersinergi dengan keberadaan industri perhotelan

dan jasa pariwisata.

3. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi

Misi ini memprioritaskan pada terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Mahakam Ulu melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan menjadi target dalam misi ini. Melalui misi ini, diharapkan mampu diwujudkan iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan demikian, akan terwujud masyarakat yang berkualitas dan mampu bersaing dalam menghadapi globalisasi. Cakupan peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya pendidikan formal namun juga pendidikan non formal, termasuk pembinaan iman dan takwa bagi masyarakat untuk menanggulangi penyakit masyarakat (narkoba, minuman keras, pornografi, pornoaksi, tindak pidana dan lain-lain). Lebih lanjut, misi ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih serta mendorong pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari lingkup masyarakat terkecil, yakni keluarga. Dengan suasana dan kondisi keluarga yang sehat, produktivitas masyarakat di segala bidang akan meningkat. Untuk dapat disebut sebagai daerah yang bermartabat, harus diwujudkan Kabupaten Mahakam Ulu yang aman, tertib, bersih, dan asri, di mana masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel

Misi ini mengarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, Pemerintah Daerah akan melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat. Misi ini juga akan mendorong Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menjalankan pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan selalu melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-

aturan yang berlaku.

Target dan Pencapaian Kinerja Pelayanan terhadap Rencana Strategis
BAPPELITBANGDA MAHAKAM ULU 2019-2024

No	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra Perangkat				Realisasi		Proyeksi		Catatan
		Standar		Daerah				Capaian				Analisis
				Nasional	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RENSTRA 2021-2026												
1	Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD	Terkendalinya capaian sasaran pembangunan daerah Terkendalinya capaian	-	100%	100%	100%	100%	98,00%	78,80%	100%	100%	
2	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	Terkendalinya dokumen perencanaan pembangunan Daerah tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95% 100%	100% 100%	
3	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Terkendalinya ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)	Terkendalinya ketersediaan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)		100%	100%	100%	100%	100	1000	100%	100%	
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahaan	Terkendalinya Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahaan		100%	100%	100%	100%	100	1000	100	100	
	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Tersedinya implemntasi rencana kelitbangan		100%	100%	100%	100%	n/a	10%	100	100	
	Persentase Penerapan Inovasi Perangkat daerah	Tersedinya penerapan inovasi perangkat daerah		100%	100%	100%	100%	n/a	20%	100	100	

2. 2. PERUMUSAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPELITBANGDA KABUPATEN
MAHAKAM ULU

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat

dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

1. Mengoptimalkan identifikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
2. Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan serta pemanfaatan sistem informasi pengendalian pembangunan
3. Meningkatkan kualitas SDM
4. Percepatan pelaporan melalui sistem aplikasi monitoring dan evaluasi
5. Peningkatan kerjasama antara Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu dengan Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi dalam melakukan pendampingan penelitian dan pengembangan.

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2025, seperti yang tercantum dalam tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Bappelitbangda Mahakam Ulu Tahun 2025

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. MAHAKAM ULU
TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakir aan Capai an Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Ke lo m po k Sa sa ra n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sum ber Dan a	Prioritas		Ta rg et	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasio nal	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						52.134.520.766						50.211.034.000,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						52.134.520.766							50.211.034.000,00	
	5	01				PERENCANAAN						36.533.291.066							35.348.312.000,00	
1	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase penunjang pelayanan perkantoran	100			100	17.269.009.013						-	16.605.400.000,00	

	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100			95	316.252.500			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan an daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH	-	-	380.100.000,00	
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	26.558.600	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DAN BAGIAN HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan an daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS	-		27.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

																PEMERINTAH DAERAH				
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.040.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH	-		26.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	25.486.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DAN A BAG I HASIL (DB H)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH	-		26.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	239.167.900	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DAN A BAG I HASIL (DB H)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran Pada Bappelitbangda Mahakam Ulu	90			87,6	7.053.365.066			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintah an daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKAT AN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTA H DAERAH	-	-	5.879.000.000,00	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6.418.485.066	Kab. Mahaka m Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DAN A ALO KASI UM UM (DA U)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintah an daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKAT AN TATA KELOLA DAN KAPASITAS	-		5.117.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan			10 Laporan	25.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DAN A BAG I HASIL (DB H)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH	-		32.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan			4 Laporan	25.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DAN A BAG I HASIL (DB H)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen			2 Dokumen	30.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DANA BAGIAN HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan layanan administrasi kepegawaian	28 orang			28 orang	291.600.000			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	-	-	700.000.000,00	

																PEMERINTAH DAERAH				
	5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28 orang			28 orang	291.600.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa	DAN A BAG I HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH	-		700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan layanan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4.754.870.599			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk	-	-	4.696.300.000,00	

																peningkatan pelayanan publik6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH				
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	201.233.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DAN A BAG I HASIL (DB H)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH	-		210.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.916.865.500	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	-		1.731.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	681.751.099	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	-		730.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

																PEMERINTAH DAERAH				
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	171.958.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH	-		125.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.495.425.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH	-		1.550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

	5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	287.638.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DAN A BAG I HASI L (DB H)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH	-		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan	100%	100%	100%	100%	101.590.800			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS	-	-	120.000.000,00	

																PEMERINTAH DAERAH				
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	28 Unit			28 Unit	101.590.800	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DAN A BAG I HASIL (DB H)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH	-		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan layanan jasa penunjang kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3.702.930.048			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk	-	-	3.949.000.000,00	

																peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH				
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	25.764.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DAN A BAG I HASIL (DB H)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH	-		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	611.640.448	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	-		820.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.065.525.600	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	-		3.074.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

															PEMERINTAH DAERAH					
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%			100%	1.048.400.000			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH	-	-	881.000.000,00	
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	8 unit	18 Unit	355.080.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DAN A BAG I HASIL (DB H)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk	-		351.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

																peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH				
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit			10 unit	193.240.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DAN A BAG I HASIL (DB H)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH	-		210.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung			1 gedung	500.080.000	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Ujoh Bilang	DAN A BAG I HASI L (DB H)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan an daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH	-		320.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan tepat waktu	100 %			100 %	11.733.378.753						100 %	13.355.000.000,00	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang di tetapkan PERDA	100%			100 %	7.252.344.700			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan an daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKATAN TATA	Ba p p eli tb an gd a	100 %	7.355.000.000,00	

																KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTA H DAERAH				
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
						Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen			2 Dokumen	1.136.724.500	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN A BAG I HASIL (DB H)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH	Ba pp eli tb an gd a		670.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														

							Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen				2 Dokumen	717.353.900	Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DAN A BAG I HASI L (DB H)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintah an daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKAT AN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTA H DAERAH	Ba pp eli tb an gd a		815.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik															
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik					1 Berita Acara	618.603.400	Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DAN A BAG I HASI L (DB H)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintah an daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik6. PENINGKAT AN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTA H DAERAH	Ba pp eli tb an gd a		720.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah															
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah					1 Berita Acara	699.333.600	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN A BAG I HASIL (DB H)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH	Bappeda		750.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota															
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	739.449.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN A BAG I HASIL (DB H)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN	Bappeda		850.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

																KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH				
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	100 Usulan	150 Usulan	205 Usulan	100 Usulan	749.965.500	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH	Bappeda		800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.590.914.800	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN A BAG I HASIL (DB H)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH	Ba pp eli tb an gda		2.750.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan data dan informasi perencanaan	100%	100 %	100 %	100%	1.753.641.747			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH	-	100 %	2.500.000.000,00	
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														

						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen			1 Dokumen	999.037.747	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGIAN HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	-		750.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah													
						Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	30 Orang			30 Orang	754.604.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGIAN HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	-		1.750.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

																PEMERINTAH DAERAH				
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang di kendalikan dan di evaluasi	100%			100 %	2.727.392.306			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH	-	100 %	3.500.000.000,00	
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan			4 Laporan	1.358.058.400	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN BAGIAN HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk	-		1.350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

																peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH				
	5	01	02	2.03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah														
							Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	30 Kerja Sama			30 Kerja Sama	603.808.306	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN A BAG I HASIL (DB H)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH	-		1.750.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														

						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan			4 Laporan	765.525.600	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGIAN HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	-		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi dan keselarasan (urusan) program kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen perencanaan dan penganggaran	100%		100%	7.075.879.200						-	5.387.912.000,00	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persentase penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun	100%		100%	2.630.738.100			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	-	100% 100% 80% %	500.000.000,00	

																KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTA H DAERAH				
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Doku men	1 Dokumen	329.879.000	Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DAN A BAG I HASI L (DB H)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintah an daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKAT AN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTA H DAERAH	-		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														

							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	251.280.200	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN A BAG I HASIL (DB H)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	140.773.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN A BAG I HASIL (DB H)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Doku men	1 Dokumen	1.211.150.000	Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DAN A BAG I HASI L (DB H)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja 5. PENINGKAT AN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	1 Lapor an	1 Laporan	247.720.000	Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DAN A BAG I HASI L (DB H)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja 5. PENINGKAT AN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	449.935.900	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGIAN HASIL (DBH)	-	2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	persentase penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)	100%			100%	1.373.899.800			-	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya	-	100%	2.000.000.000,00	
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Doku men	1 Dokumen	337.381.400	Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DAN A BAG I HASI L (DB H)	-	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya4. PENINGKATAN USAHA EKONOMI RAKYAT	-		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1 Lapor an	1 Laporan	212.176.000	Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DAN A BAG I HASI L (DB H)	-	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya 4. PENINGKATAN USAHA EKONOMI RAKYAT	-		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													

						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1 Lapor an	1 Laporan	324.360.400	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN A BAG I HASIL (DB H)	-	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya 4. PENINGKATAN USAHA EKONOMI RAKYAT	-		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian													
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1 Lapor an	1 Laporan	499.982.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN A BAG I HASIL (DB H)	-	3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya 6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH	-		600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persentase penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%			100%	3.071.241.300			-	4. Pemenuhan infrastrukturu wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar 1. PENINGKAT AN KONEKTIVIT AS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRU KTUR DASAR	-	10 0 %	2.887.912.000,00	
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan			4 Laporan	850.152.300	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN A BAG I HASIL (DB H)	-	4. Pemenuhan infrastrukturu wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar1. PENINGKAT AN KONEKTIVIT AS DAN KUALITAS	-		850.980.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

																PELAYANAN INFRASTRU KTUR DASAR				
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan			4 Laporan	1.028.050.500	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN A BAG I HASIL (DB H)	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		1.036.932.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														

							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan			5 Laporan	693.038.500	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN A BAG I HASIL (DB H)	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan			2 Laporan	500.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN A BAG I HASIL (DB H)	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

																KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR				
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					16.056.253.800								14.862.722.000,00	
4	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase peningkatan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	60%			65	16.056.253.800						-	14.862.722.000,00	
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Cakupan dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100%			100%	10.270.415.500			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH	-	-	11.250.000.000,00	
	5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														

						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3 dokumen			3 dokumen	10.270.415.500	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGIAN HASIL (DBH)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	-		9.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan													
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	2 Dokumen			2 Dokumen	-	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	-		1.750.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

																PEMERINTAH DAERAH				
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cakupan dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%			100 %	4.377.722.600			-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 2. PENINGKATAN KETAHANAN SUMBERDAYA AIR, ENERGI DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP	-	-	2.662.722.000,00	
	5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2 Dokumen			2 Dokumen	299.932.100	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN BAGIAN HASIL (DBH)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan 2. PENINGKATAN	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

																KETAHANAN SUMBERDAYA AIR, ENERGI DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP				
	5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum														
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	5 Dokumen			5 Dokumen	1.192.583.500	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGIAN HASIL (DBH)	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		1.149.722.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5	05	02	2.03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman														

							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4 Dokumen			4 Dokumen	2.636.143.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN A BAG I HASIL (DB H)	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	-		1.063.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.03	0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika														
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	4 Dokumen			4 Dokumen	249.064.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN A BAG I HASIL (DB H)	-	4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar 1. PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

																KUALITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR				
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Cakupan dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100			100	1.408.115.700			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan an daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik 6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH	-	-	950.000.000,00	
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														

						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen			1 Dokumen	1.163.491.700	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN A BAG I HASIL (DB H)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik	-		700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan													
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan			1 Laporan	244.624.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN A BAG I HASIL (DB H)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik6. PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH	-		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	J U M L A H	52.134.520.766		50.211.034.000,00	
--	-------------	----------------	--	-------------------	--

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappelitbangda Tahun 2022 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke-5, periode renstra 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi

Bappelitbangda dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu dalam menjalankan tugas dan fungsi PD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan OPD tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.